

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Palu pada tahun 2024, dalam prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Walaupun, dalam praktiknya masih terdapat kekurangan, khususnya terkait sertipikat yang keluar hanya 50 dari yang ditargetkan. Meskipun demikian, program PTSL secara keseluruhan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah bagi masyarakat, melalui Sertipikat Hak Milik atas tanah, serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Kota Palu, terkhusus Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Birobuli Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Palu untuk meningkatkan efektivitas, agar kedepannya jumlah penerbitan sertipikat sama dengan yang ditargetkan, atau lebih banyak daripada yang ditargetkan. Serta menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan pihak kelurahan, untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Palu. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan PTSL di Kota Palu ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Hardono, 2020, *Hukum Agraria Jakarta: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*, Cetakan Ketigabelas, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Jakarta dan Pengaturan-Pengaturan Pelaksanaan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Effendi Perangin-angin, 2016, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Depok.
- FX. Sumarja, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung, Lampung.
- Hartiwiningsih, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, 2023. *Metode Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten.
- Kartini Muljadi, dkk, 2008. *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Rachmat Trijono, dkk, 2015, *Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rusman Murad, 2013, *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, Penerbitan Maju Mundur, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984, Universitas Jakarta Press, Jakarta.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Umar Ma'ruf, 2010, *Politik Hukum Pertanahan*, Cetakan Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan
Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen
Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 227.

Jurnal Hukum

Ahmad Ramadani Chairi dan Aris Munandar, “Pendaftaran Hak Atas Tanah pada
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, *Jurnal Kertha
Semaya*, Vol. 10, No. 8, Juni 2022, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
hlm. 1742.

Suekhrisna Teja, dkk, 2022. “Eksistensi Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan di Indonesia”. *Acta Agraria Indonesia*
8, no.2.

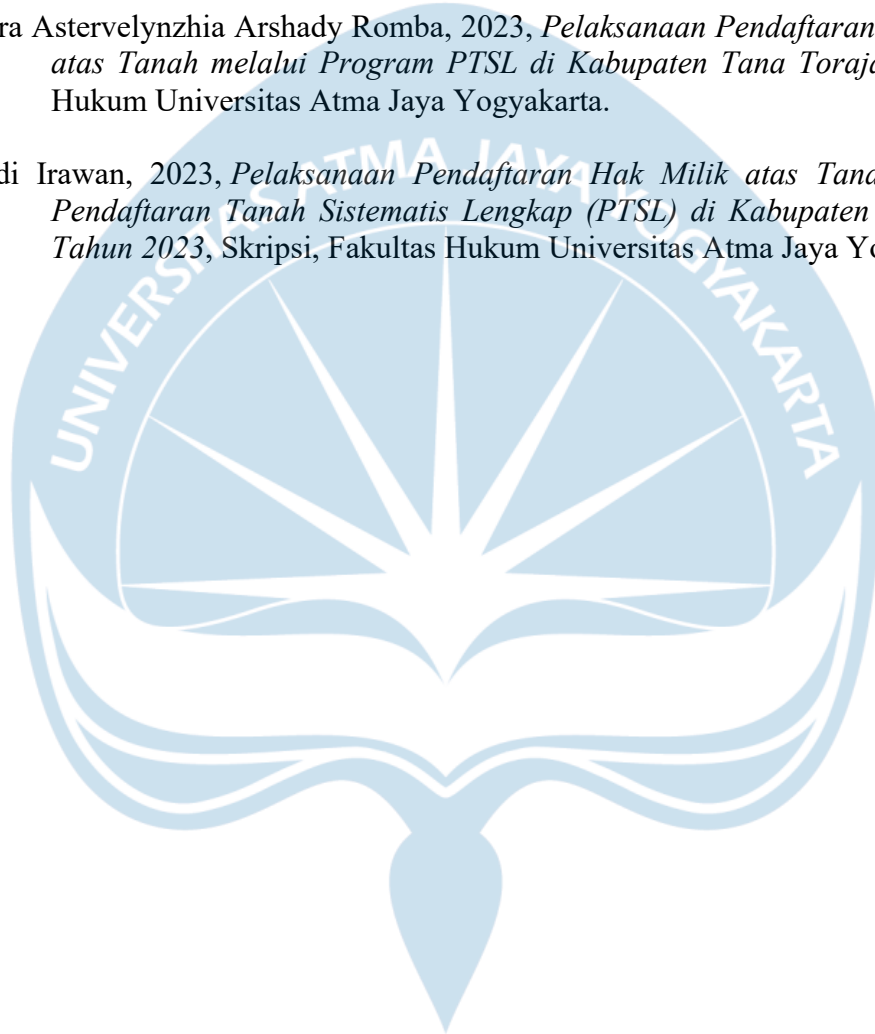
Reda dan Istiqomah, 2021. “Pendaftaran Tanah di Indonesia”. *Jurnal Magister
Ilmu Hukum*2, no.2

Hasil Penelitian

Nathania Jonah Alamanda Sahetapy ,2024, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Jayapura*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

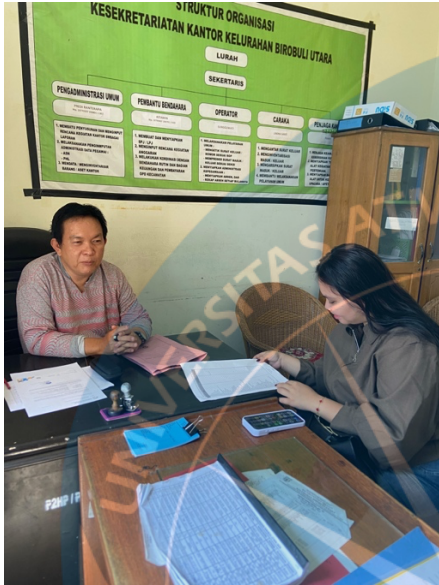
Tiara Astervelynzhia Arshady Romba, 2023, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Program PTSL di Kabupaten Tana Toraja*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Widi Irawan, 2023, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



LAMPIRAN

Lampiran Wawancara dengan Pak Edi selaku pihak Kelurahan dan Anggota Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas PTSL



Lampiran Wawancara dengan Pihak ATR/BPN Kota Palu



Lampiran Wawancara dengan Bapak/Ibu yang mengikuti Kegiatan PTSL di kelurahan Birobuli Utara tahun 2024.

